



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH JENJANG SMA/MA DAN SMK
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Swasta khususnya SMA / MA dan SMK di Kabupaten Semarang, pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan Bantuan Hibah untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Peraturan Menteri.....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH JENJANG SMA/MA DAN SMK DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pasal 1

Pedoman Bantuan Hibah untuk Lembaga Pendidikan Swasta Penyelenggara Ujian Sekolah Jenjang SMA/MA dan SMK di Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

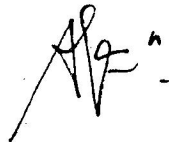
Pasal

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
di undangkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-03-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 24.

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 24 Tahun 2010

Tanggal : 29 - 03 - 2010

PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH JENJANG SMA/MA DAN SMK
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2009/2010

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk SMA/MA dan SMK, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut lembaga pendidikan khususnya sekolah swasta ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkualitas yang dapat menjangkau seluruh SMA/MA dan SMK Swasta terwujud.

Melihat kondisi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan lembaga pendidikan swasta walaupun secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Hibah yang diberikan untuk SMA/MA dan SMK Swasta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang agar lembaga pendidikan swasta lebih maju, bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan bantuan Hibah kepada SMA/MA dan SMK Swasta untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada Tahun Pelajaran 2009/2010.
2. Bantuan biaya Penyelenggaraan Ujian Sekolah diberikan untuk meringankan pihak SMA/MA dan SMK Swasta yang memiliki siswa kelas III kurang mampu pada tahun pelajaran 2009/2010.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah SMA/MA dan SMK Swasta di wilayah Kabupaten Semarang yang memiliki siswa kelas III dengan kriteria kurang mampu pada tahun pelajaran 2009/2010.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan diwujudkan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima lewat Bank terdekat.

E. Kriteria

1. Sekolah penerima bantuan adalah SMA/MA dan SMK Swasta yang pada Tahun Pelajaran 2009/2010 masih memiliki siswa kelas III (tiga) yang kurang mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang.
2. Besaran bantuan diberikan berdasarkan jumlah siswa kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Belanja Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 kepada SMA/MA dan SMK Swasta yang digunakan untuk Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah pada Tahun Pelajaran 2009 / 2010 antara lain :

- a. Pembelian alat tulis untuk kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah.
- b. Pembelian alat praktek atau bahan praktek untuk kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah.
- c. Kebutuhan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan ujian sekolah.

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Bantuan Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Pengurus Yayasan dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Jenis belanja
 - Jumlah biaya
2. Waktu Pelaksanaan/Jadwal Kegiatan
3. Susunan Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak sekolah membuka rekening Bank terdekat atas nama Kepala Sekolah atau Bendahara (Rekening Sekolah).
2. Bantuan berbentuk uang tunai langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing.
3. Pihak sekolah diwajibkan membuat akta perjanjian bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah penerima bantuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SP J) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di Bank.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Swasta penerima bantuan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010.

WAKIL BUPATI SEMARANG,


Hj. SITI AMBAR FATHONAH